



WALIKOTA BUKITTINGGI

INSTRUKSI WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor : 476.2/ ~~391~~ /DP3APPKB/IV/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan mengaplikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor. 050/145/II//Pem-PM/Bappeda-2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kab/Kota se- Sumatera Barat Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Tim Driver Pengarusutamaan Gender
2. Kepala Satuan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
- Untuk :
KESATU : Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
- KEDUA : Menindaklanjuti hal tersebut, kepada Pemerintah Kota Bukittinggi diamanatkan untuk membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang diketuai oleh Kepala Bappelitbang dan Sekretaris yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).
- KETIGA : Guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2022 mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2022 dengan menggunakan matrik Format 8 (delapan) kolom (F8K) sebagaimana terlampir pada surat edaran ini.
- KEEMPAT : Substansi dan target Rencana Aksi sebagaimana point 3 tersebut diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh SKPD se-Kota Bukittinggi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing berdasarkan edaran terlampir.

- KELIMA** : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi bertanggungjawab untuk :
- a. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Aksi RANDA PUG untuk melaksanakan Aksi sesuai dengan lampiran surat edaran ini;
 - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana Aksi, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.
- KEENAM** : Bappelitbang Kota Bukittinggi selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Kedua belas) pada semua Aksi pada website: <https://serambi.ksp.go.id>, dengan periode waktu penyampaian pelaporan sebagai berikut:
- a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Maret 2022.
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 April 2022.
 - b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Juni 2022.
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Juli 2022.
 - c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 September 2022.
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Oktober 2022.
 - d. Periode B12 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Desember 2022.
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Januari 2022
- KETUJUH** : Tim Penggerak Perencana dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, Badan Keuangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota pada website: <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap periode B03 (Bulan Ketiga), B06(Bulan Keenam),B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Keduabelas), setelah periode waktu penyampaian pelaporan ditutup, dengan jadwal sebagai berikut :
- a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 April 2022
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 April 2022

- b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Juli 2022
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Juli 2022
- c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Oktober 2022
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Oktober 2022
- d. Periode B12 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Januari 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Januari 2023

KEDELAPAN : Penilaian terhadap capaian pelaksanaan Aksi RANDA PUG Kabupaten/Kota didasarkan dari hasil verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan target yang telah ditetapkan pada setiap periode B03, B06, B09, B12, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Warna Biru dengan predikat sangat memuaskan, untuk capaian lebih dari 100%;
- b. Warna Hijau dengan predikat memuaskan, untuk capaian antara 75,01%-100%;
- c. Warna Kuning dengan predikat perlu perhatian, untuk capaian antara 50,01-75%;
- d. Warna Merah dengan predikat mengecewakan, untuk capaian antara 0%-50%
- e. Khusus untuk periode B12 penilaian bersifat biner antara Warna Hijau (dengan capaian 100%) dan warna merah (dengan capai kurang dari 100%)

KESEMBILAN : Inspektorat:

- a. Review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender:
 - Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2022.
 - Pemeriksaan implementasi GAP dan GBS t.a 2020 periode Januari – Maret 2022.
 - Review terhdp implementasi PPRG periode April - Juni 2022.
 - Review terhdp implementasi PPRG periode Juli - Sept 2022.
 - Review terhdp implementasi PPRG periode Okt – Des 2022.
- b. Tersusunnya rekomendasi terkait implementasi PPRG yang disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan pada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.
- c. Review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender:
 - Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2022.
 - Pemeriksaan implementasi GAP dan GBS t.a 2020 periode Januari – Maret 2022.
 - Review terhdp implementasi PPRG periode April - Juni 2022.
 - Review terhdp implementasi PPRG periode Juli - Sept 2022.
 - Review terhdp implementasi PPRG periode Okt – Des 2022.
- d. Tersusunnya rekomendasi terkait implementasi PPRG yang disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan pada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.

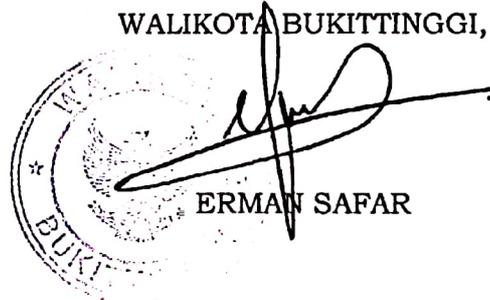
- KESEPULUH : Tim penggerak Perencana dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) Kota Bukittinggi yang terdiri dari Bapelitbang, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi melakukan Verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh SKPD.
- KESEBELAS : Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
- Mendukung/melaksanakan/memasukkan program Pengarusutamaan Gender pada program/kegiatan di SKPD.
 - Membuat GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Penyusunan RKA SKPD untuk sub kegiatan tahun 2022.
 - Mengaktifkan dan memantau pelaksanaan tugas Focal Point PUG pada SKPD yang bersangkutan.
- KEDUABELAS : Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan RANDA PUG Kota Bukittinggi untuk Tahun 2022 dapat menghubungi Bapelitbang Kota Bukittinggi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat atau Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Sekretariat PPRG Kota Bukittinggi Bidang Pengarusutamaan Gender.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI

Pada tanggal : 1 April 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Lampiran:

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APKB	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	<p>B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi /kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi <u>Dirubah menjadi :</u> Advokasi Peraturan/kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi</p>		<p>B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya)</p> <p>B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya) 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau klipng koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi) <u>Dirubah menjadi :</u> Scan data dukung pelaksanaan/Advokasi seperti surat atau klipng koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.
					B12: -		B12: -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	B03: 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B03: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Bapelitbang	Terakomodinya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.		B03: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD. 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.
					B06: Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang memuat substansi: 1. Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif		B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah satu dasar hukum (tetap) atau termuat di BAB I 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
					<p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang memuat substansi :</p> <p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I</p> <p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>B09:</p> <p>1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023.</p> <p>2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum atau termuat di BAB I</p> <p>3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha, melampirkan surat usulan Draft ke Bagian Hukum.
					B06: 1. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B06: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha (SK sudah di tanda tangani oleh Kepala Daerah)
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Tertindaknya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Perguruan Tinggi/Dunia Usaha					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala perangkat daerah kab/kota dan kepala instansi vertical di Kab/kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
Stakeholder terkait khususnya OPD yang	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Tersedia program dan kegiatan yang	Tersusunnya Program dan	B03: -		B03: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
memiliki program dan kegiatan dengan sasaran kelompok rentan dan perempuan khususnya			sasarannya kelompok rentan dan perempuan khususnya	Kegiatan dengan sasaran kelompok rentan	B06:		B06: -
					B09:		B09: 1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang sarasannya kelompok rentan dan perempuan dalam bentuk Renja SKPD
					B12:		B12: -

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota B06: -		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B06: -
--	---------------------------	---------------	--	---	---	--	---

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2022	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang memuat responsive gender berupa surat edaran dalam	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03 : 1.		B03 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			penyusunan KUA PPAS 2023		B06: -		B06: -
					B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023		B09 : Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023
					B12: -		B12:
			Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2023 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -
					B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2023		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA Perubahan tahun 2022 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2022 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 4. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun 2023 ke DPRD
					B12:		B12 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023		1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas P3APPKB	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesejangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
					B06:		B06:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning		1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 4. Daftar kegiatan yang responsif gender ditanda tangani oleh kepala Bappeda.
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
					B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangan oleh Ketua Pokja PUG

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2022 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Januari – Maret 2022.		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Januari – Maret 2022.
			Tersedianya Pedoman Reviu Terhadap PPRG di Pemerintah Kab/Kota	Penyusunan pedoman Reviu yang memuat PPRG	B03 : Tersusunnya draft pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota		B03 : Scan draft pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten Kota
					B06: 1. Terbitnya Pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten Kota. 2. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode April – Juni 2021		B06: 1. Scan Pedoman reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota 2. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan/Notadinas, absensi, notulen dan dokumentasi. 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode April – Juni 2021
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG		B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Juli - September 2022		2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Juli - September 2022
					B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Oktober - Desember 2022		B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Oktober - Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR